KERANGKA ACUAN KERJA/TOR

Tahun Anggaran 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program | : | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian |
| Kegiatan | : | Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (1751) |
| Output | : | Layanan Data dan Informasi (963) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Kode MAK | : | 1751.963.103.051 |



PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2021

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

## LEMBAR PENGESAHAN

**KERANGKA ACUAN KERJA/TOR TAHUN 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Output** | **:** | Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penggaran, Kinerja |
| **2.** | **Tujuan dan Sasaran** | **:** | Tujuan:   * Identifikasi kebutuhan integrasi aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Integrasi Aplikasi Penganggaran * Membuat web service aplikasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan * Membuat portal layanan aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan   Sasaran:   * Terlaksananya Identifikasi kebutuhan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian. * Terbangunnya web service Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian. * Terbangunnya portal layanan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian. |
| **3.** | **Keluaran** | **:** | * Aplikasi layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja yang terintegrasi |
| **4.** | **Jangka Waktu** | **:** | 12 Bulan (Januari – Desember 2021) |
| **5.** | **Lokasi Kegiatan** | **:** | Satker Pusat dan Satker Daerah Lingkup Kementerian Pertanian |
| **6.** | **Biaya** | **:** | Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta rupiah) |

Menyetujui

Kepala Pusat Data & Sistem Informasi Kepala Bagian Umum

Pertanian/ Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Umum,

**Dr. Akhmad Musyafak, SP, MP**  **Ir. Bayu Mulyana, MM**

NIP. 19730405 199903 1 001 NIP. 19660625 199203 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)**

**PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUNAN**

1. **Latar Belakang**
2. **Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

* Peraturan menteri Pertanian Nomor 19/2015 tentang rencana strategis kementerian pertanian 2015 - 2019
* Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
* Peraturan Menteri Pertanian nomor 51/2016 tentang tata kelola TIK
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. **Gambaran Umum**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian untuk semakin berinovasi dan memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholders di Kementerian Pertanian. Saat ini teknologi informasi bukan lagi sebagai alat akan tetapi menjadi sebuah *enabler* yang dapat menjembatani kebutuhan bisnis di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu posisi Pusdatin merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengintegrasikan aplikasi dan menerapkan eGovernment.

Permintaan layanan TI yang semakin banyak dan cepat menuntut Pusdatin untuk dapat mengakomodir layanan TI. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi sistem informasi yang saling terintegrasi. Pusdatin melalui Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi melakukan pengembangan aplikasi dan melakukan integrasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sesuai permintaan masing-masing unit kerja. Aplikasi yang dikembangkan dituntut cepat dan saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga menghasilkan aplikasi yang efektif dan efisien.

Adapun sesuai dengan Lampiran Permentan Nomor : 19/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal, menjelaskan uraian tentang tugas Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi adalah:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengembangan aplikasi sistem informasi
2. Melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi
3. Melaksanakan sosialisasi aplikasi sistem informasi

Berdasarkan tugas tersebut subbidang Aplikasi Sistem Informasi wajib mengembangkan sistem informasi sesuai dengan arahan yang ada di Rencana Induk TIK Kementrian Pertanian 2017-2021 dimana pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan strategi pendukung penguatan pembangunan pertanian.

Sistem informasi harus di kelola agar dapat berfungsi sesuai dengan bisnis proses yang telah dikembangkan oleh karena itu pengelolaan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu fokus SPBE yaitu integrasi sistem informasi yang terbagi menjadi empat kategori yaitu: aplikasi layanan kepegawai, aplikasi layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja, aplikasi layanan kearsipan, dan aplikasi layanan publik. Selain itu terdapat tata kelola TIK Permentan nomor 51/2016 yang mengatur aspek pengelolaan TIK di Kementerian Pertanian.

Dengan kebutuhan diatas maka diperlukan kegiatan yang mampu mendukung pengembangan, penyempurnaan, dan pengawalan yang dilaksankan oleh Subbidang Aplikasi Sistem Informasi.

1. **Alasan Kegiatan dilaksanakan**

Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pengembangan TIK di Kementerian Pertanian.

1. **Kegiatan yang dilaksanakan**
2. **Uraian Kegiatan**

Kegiatan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan meliputi:

* 1. Identifikasi Proses Bisnis. Melakukan identifikasi proses bisnis terhadap aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan.
  2. Identifikasi dan analisis resiko. Melakukan identifikasi dan analisis resiko yang dihadapi terkait integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan.
  3. Analisis Kesenjangan. Melakukan analisis kesenjangan dan dampak integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan.
  4. Identifikasi kebutuhan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan. Melakukan identifikasi kebutuhan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan.
  5. Penyediaan web service aplikasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Membuat web service untuk integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan.
  6. Pembuatan portal layanan aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan. Membuat portal perencanaan, penganggaran dan keuangan yang terintegrasi.

Pada kegiatan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan ini bekerjasama dengan instansi dari Kementerian Keuangan, BPK, dan Bappenas. Integrasi terkait dengan aplikasi Simak BMN, SAKTI, OMSPAN dari Kementerian Keuangan, sedangkan dari BPK terkait aplikasi BAST BANPEM dan SIMLUHTAN, kemudian dari Bappenas terkait aplikasi Eproposal dan E-Musrenbangtan

1. **Batasan Kegiatan**

Kegiatan ini terbatas pada integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Aplikasi yang terdapat pada layanan perencanaan, penganggaran dan kinerja yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Aplikasi** | **SATKER** | **Instansi Terlibat** |
| Rakortek | Biro Perencanaan | Kementerian Keuangan, BAPPENAS |
| E-Proposal | Biro Perencanaan |
| E-Musrenbang | Biro Perencanaan |
| Renja | Biro Perencanaan |
| RKAKL | Biro Keuangan |
| KRISNA | Biro Perencanaan |
| SPAN | Biro Keuangan |
| SAIBA | Biro Keuangan |
| SAKTI | Biro Keuangan |
| SMART | Biro Perencanaan |
| SIMAK BMN | Biro Keuangan |
| SAKIP | Biro Perencanaan |
| BAST-Banpem | Biro Keuangan |
| Monev | Biro Keuangan |
| SIMONAS | Pusdatin |

1. **Maksud dan Tujuan**
2. **Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan Pengembangan dan pengawalan Aplikasi adalah agar tersedianya aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung para pengambil kebijakan serta pengelola administrasi, sehingga dapat membantu memudahkan dalam melakukan pekerjaan di unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

1. **Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:**
   1. Melakukan identifikasi kebutuhan integrasi aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Kinerja
   2. Membuat web service aplikasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan
   3. Membuat portal layanan aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

* 1. Terlaksananya Identifikasi kebutuhan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian.
  2. Terbangunnya web service Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian.
  3. Terbangunnya portal layanan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian.

1. **Indikator Keluaran dan Keluaran**
2. **Indikator Keluaran**
   * + Dilaksanakannya kegiatan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
3. **Keluaran**

* Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Kinerja yang terintegrasi

1. **Cara Pelaksanaan Kegiatan**
2. **Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan dengan swakelola dan konsultan.

1. **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sbb:

* Koordinasi dilakukan mulai dari merencanakan pengembangan dan integrasi aplikasi dan koordinasi dengan 12 eselon I.
* Inventarisasi aplikasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi, dengan Eselon I terkait
* Implementasi integrasi tahapan ini dilakukan pada aplikasi – aplikasi hasil inventarisasi
* Ujicoba Integrasi, tahapan ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemilik aplikasi (Eselon I)
* Pembinaan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi
* Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil Implementasi Integrasi Aplikasi
* Operasional terdiri dari Paket meeting dalam kota, Paket Meeting Luar Kota, dan Perjalanan Dinas yang mendukung kegiatan aplikasi sistem informasi.
* Penyusunan Dokumentasi dan Pembuatan laporan akhir meliputi dokumentasi aplikasi serta penyusunan dan penggandaan laporan akhir.

1. **Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini bertempat di Jakarta dan beberapa provinsi di Indonesia

1. **Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**
2. **Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dilaksanakan oleh Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Informasi.

1. **Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan adalah Kasubbid Aplikasi Sistem Informasi.

1. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pusdatin dan unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian

1. **Jadwal Kegiatan**

**Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari 2021 - Desember 2021. Jadwal kegiatan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Ags** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** |
| **Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Kinerja** | | | | | | | | | | | | |
| * Koordinasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ujicoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Pembinaan Admin Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Lap. Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Peluang dan Analisa Resiko**

* Peluang

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Peluang** |
| 1. | Tersedianya anggaran dapat mengoptimalkan pengembangan aplikasi |
| 2. | Kebutuhan data/informasi administrasi yang berkualitas berbasis TI |
| 3. | Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan |

* Analisa Resiko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Resiko yang Mungkin Terjadi** | **Rencana Penanganan** |
| 1. | Perubahan / revisi anggaran | Merevisi target dan mengoptimalkan dengan kebutuhan yang lain |
| 2. | Perubahan Kebijakan Organisasi | Menyesuaikan desain sistem, alur dan output sistem sesuai perubahan kebijakan organisasi |
| 3. | Gangguan layanan infrastruktur TIK | Koordinasi dengan subbidang sistem jaringan komputer |

1. **Biaya yang Dibutuhkan**

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Aplikasi Sistem Informasi sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua juta rupiah).

Secara rinci alokasi biaya untuk melaksanakan kegiatan ini dapat dilihat pada RAB terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Umum Penanggung Jawab Kegiatan

**Ir. Bayu Mulyana, MM. Aryo Wicaksono, S.Kom, MM.**

NIP. 19660625 199203 1 002NIP. 19700705 199603 1 002